

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEHADIRAN PEGAWAI ONLINE DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BATANGHARI

Farras Al Munawwar
NPP. 33.0541

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan
Email: 2005farras@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Rotzami, M. Si
Email: rotzami@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): This study is motivated by the importance of implementing an Electronic-Based Government System to support effective, efficient, transparent, and accountable governance. One form of its implementation in Batanghari Regency is the use of the Online Employee Attendance Information System, known as SiKePO, as a digital attendance system for civil servants. This application aims to make employee attendance recording more organized, faster, and integrated. However, its implementation still faces several obstacles, such as limited internet connectivity, uneven employee ability, technical system disruptions, and limited supporting facilities. **Purpose:** This study aims to identify and describe the implementation of the Electronic-Based Government System through the SiKePO application at the Communication and Informatics Office of Batanghari Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The analysis uses Richard Heeks' Design-Reality Gap theory, which consists of seven dimensions: information, technology, processes, objectives and values, staffing and skills, management systems, and other supporting resources. **Result:** The results show that the implementation of SiKePO in supporting the Electronic-Based Government System in Batanghari Regency has been carried out fairly well. The application has contributed to improving employee discipline, increasing the efficiency of personnel administration, enhancing attendance data transparency, and strengthening accountability in civil servant performance evaluation. However, its implementation has not yet been fully optimal due to several challenges in technology, human resources, and supporting facilities. **Conclusion:** Therefore, strengthening internet networks, improving employee capacity, conducting regular system maintenance, and integrating SiKePO with other personnel systems are needed to ensure more effective and sustainable implementation.

Keywords: Design-Reality Gap, e-Government, Electronic-Based Government System, Personnel Administration, SiKePO

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk penerapan SPBE di Kabupaten Batanghari adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online

(SiKePO) sebagai sistem presensi digital bagi Aparatur Sipil Negara. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan kehadiran pegawai secara lebih tertib, cepat, dan terintegrasi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan internet, kemampuan pegawai yang belum merata, gangguan teknis sistem, serta keterbatasan fasilitas pendukung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi SPBE melalui aplikasi SiKePO di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori Design–Reality Gap dari Richard Heeks yang terdiri atas tujuh dimensi, yaitu informasi, teknologi, proses, tujuan dan nilai, sumber daya manusia, sistem manajemen, serta sumber daya pendukung lainnya. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SiKePO dalam mendukung SPBE di Kabupaten Batanghari telah berjalan cukup baik. Aplikasi ini berdampak positif terhadap peningkatan disiplin pegawai, efisiensi administrasi kepegawaian, transparansi data kehadiran, serta akuntabilitas dalam evaluasi kinerja ASN. Meskipun demikian, implementasi SiKePO belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek teknologi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, diperlukan penguatan jaringan internet, peningkatan kemampuan pegawai, pemeliharaan sistem secara berkala, serta integrasi dengan sistem kepegawaian lainnya agar penerapan SPBE dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. **Kata kunci:** Administrasi Kepegawaian, Design–Reality Gap, e-Government, SiKePO, SPBE

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah dituntut mengadopsi sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini dikenal sebagai e-Government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi pemerintahan (Layne & Lee, 2001). Menurut Layne dan Lee (2001), e-Government tidak hanya merupakan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan struktur, proses, dan budaya kerja birokrasi. Sejalan dengan itu, administrasi pemerintahan daerah pada era digital dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen peningkatan efektivitas pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah (Achmad & Zubakhrum, 2024).

Di Indonesia, transformasi digital diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penguatan transformasi digital juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan profesionalitas ASN, penguatan kinerja, serta pemanfaatan teknologi dalam manajemen kepegawaian.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh formulasi kebijakan, tetapi juga oleh pelaksanaannya di tingkat operasional (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam konteks SPBE, penerapan tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik eksternal, tetapi juga pada layanan internal pemerintahan, termasuk layanan kepegawaian ASN yang mencakup sistem kehadiran, penilaian kinerja, dan pengelolaan data pegawai berbasis digital. Pemanfaatan sistem kehadiran elektronik berbasis teknologi terbukti mampu meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran, efisiensi administrasi, serta

mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan data presensi pegawai (Sunaryono, Siswantoro, & Anggoro, 2021).

Kabupaten Batanghari merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan SPBE melalui Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) sebagai instrumen pencatatan kehadiran ASN secara elektronik, real-time, dan terintegrasi. Pengelolaan aplikasi ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Batanghari yang berperan dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan aplikasi daerah, dan integrasi sistem SPBE. Dalam pengelolaan sistem informasi kepegawaian, aspek keamanan informasi juga menjadi faktor penting karena data ASN merupakan aset strategis yang harus dijaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya guna mendukung tata kelola pemerintahan yang andal (Zafar, 2013).

Data Indeks SPBE Kabupaten Batanghari menunjukkan peningkatan dari 2,03 pada tahun 2021 menjadi 3,55 pada tahun 2024, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transformasi digital. Namun, capaian indeks tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi implementasi layanan digital pada level operasional, khususnya pada aplikasi kepegawaian seperti SiKePO. Hasil observasi awal menunjukkan belum adanya pemetaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara komprehensif, serta masih terdapat tantangan berupa keterbatasan integrasi antar sistem, variasi literasi digital ASN, dan belum optimalnya evaluasi layanan berbasis indikator SPBE. Selain faktor teknologi, keberhasilan implementasi sistem digital juga dipengaruhi oleh kesiapan pengguna dalam menerima dan memanfaatkan teknologi. Yi dan Hwang (2003) menjelaskan bahwa kepercayaan diri pengguna terhadap kemampuan menggunakan sistem (self-efficacy) berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dan penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kompetensi dan literasi digital ASN dalam mendukung keberhasilan implementasi SiKePO.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan digital pemerintah dengan realitas implementasi di tingkat daerah. Untuk menganalisis kesenjangan tersebut digunakan pendekatan Design-Reality Gap yang dikembangkan oleh Richard Heeks, yang menjelaskan bahwa ketidakefektifan sistem informasi pemerintahan sering disebabkan oleh perbedaan antara desain sistem dengan kondisi nyata organisasi, baik dari aspek teknologi, sumber daya manusia, struktur organisasi, maupun proses kerja (Heeks, 2006).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai implementasi SPBE oleh Diskominfo Kabupaten Batanghari dalam mendukung layanan kepegawaian melalui aplikasi SiKePO serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatannya. Penelitian ini penting karena tidak hanya melihat SPBE dari sisi capaian indeks, tetapi juga dari implementasi nyata di tingkat operasional sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan tata kelola layanan digital, penguatan infrastruktur TIK, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kompetensi digital ASN, serta optimalisasi pemanfaatan aplikasi SiKePO secara berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Permasalahan yang ditemukan adalah masih adanya kendala dalam pelaksanaan aplikasi SiKePO, seperti keterbatasan jaringan internet, gangguan teknis sistem,

belum meratanya kemampuan pegawai dalam penggunaan teknologi, serta belum optimalnya integrasi sistem kepegawaian berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengalami peningkatan nilai Indeks SPBE, masih terdapat perbedaan antara capaian SPBE secara makro dengan realitas implementasi layanan kepegawaian digital di tingkat operasional.

Kesenjangan penelitian (research gap) yang melatarbelakangi penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas implementasi SPBE pada layanan administrasi kepegawaian internal melalui aplikasi SiKePO di pemerintah daerah. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi e-government dan SPBE secara umum, pengukuran indeks SPBE, tata kelola pemerintahan digital, atau efektivitas aplikasi kepegawaian seperti SIMPEG dan e-Kinerja. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan integrasi sistem kepegawaian digital serta belum menggunakan pendekatan Design–Reality Gap dari Richard Heeks untuk menganalisis kesenjangan antara desain sistem dan kondisi implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis implementasi SPBE melalui aplikasi SiKePO secara lebih mendalam pada tingkat operasional pemerintahan daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) di Kabupaten Batanghari masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, gangguan jaringan internet, kemampuan digital aparatur yang belum merata, serta belum optimalnya integrasi sistem kepegawaian. Kondisi ini perlu segera dikaji karena transformasi digital pemerintahan menjadi tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini penting dilakukan untuk menghasilkan gambaran nyata mengenai kesesuaian antara desain kebijakan SPBE dengan realitas implementasinya di tingkat operasional, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Batanghari dalam meningkatkan kualitas layanan kepegawaian berbasis digital. Apabila permasalahan tersebut tidak diteliti dan ditindaklanjuti, maka berpotensi menghambat optimalisasi SPBE, menurunkan efektivitas pengelolaan kehadiran ASN, mengurangi akurasi data kepegawaian, serta memperlambat upaya reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan daerah.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas implementasi e-government, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan administrasi kepegawaian. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah ada, menemukan kesenjangan penelitian (research gap), serta memperkuat dasar ilmiah penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Wuryan Andayani dengan judul Penguatan Good Governance: Penerapan E-Government di Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa implementasi e-government mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Namun demikian, penelitian tersebut menemukan beberapa kendala utama berupa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Dowa (2022) yang menjelaskan bahwa implementasi aplikasi e-NADI yang terintegrasi dalam

penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi serta mendukung integrasi data pemerintahan, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek kesiapan pengguna dan dukungan infrastruktur teknologi.

Selanjutnya, penelitian Bagas Dwi Kencono yang berjudul Tantangan SPBE di Indonesia menganalisis berbagai hambatan dalam implementasi SPBE di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, serta budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung transformasi digital. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Hidayah dan Almadani (2022) yang menganalisis tingkat kematangan SPBE pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan tata kelola, manajemen layanan, manajemen risiko, serta kesiapan sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Penelitian R.M. Iman Rifai dan Suci Flambonita mengenai SPBE dan Good Governance menjelaskan bahwa penerapan SPBE berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan SPBE memerlukan dukungan regulasi yang kuat serta koordinasi antarinstansi yang lebih baik untuk menjamin integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hendiyani dan Fansuri (2024) mengenai evaluasi kebijakan clearance SPBE pada kementerian dan lembaga yang menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SPBE tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan, koordinasi kelembagaan, pengawasan, serta kesesuaian antara perencanaan sistem dengan kebutuhan organisasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewia Zebua dkk. dengan judul Efektivitas e-Kinerja ASN berfokus pada pemanfaatan aplikasi digital dalam manajemen kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi kepegawaian mampu meningkatkan disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya kendala teknis berupa gangguan sistem dan keterbatasan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi secara optimal. Hasil ini memiliki kesamaan dengan penelitian Taufan dan Hidayat (2023) mengenai Analisis Aplikasi ASN Memayu di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menunjukkan bahwa aplikasi kepegawaian berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data ASN, disiplin pegawai, dan kualitas layanan internal pemerintahan, meskipun masih ditemukan hambatan berupa adaptasi pengguna, kebutuhan peningkatan kompetensi digital, serta pengembangan fitur aplikasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, penelitian M.I.R. Rantung yang berjudul Implementasi E-Government di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa implementasi SPBE di tingkat daerah telah berjalan cukup baik dalam mendukung pelayanan pemerintahan. Akan tetapi, masih ditemukan beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, koordinasi antarorganisasi yang belum optimal, dan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi e-government dan SPBE secara umum, baik dari aspek kebijakan, tata kelola pemerintahan, maupun efektivitas layanan publik. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi SPBE melalui aplikasi kepegawaian daerah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menyoroti peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola sistem digital pemerintahan dalam mendukung layanan administrasi kepegawaian.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada implementasi e-government dan SPBE pada tingkat makro, tata kelola pemerintahan secara umum, serta efektivitas aplikasi kepegawaian seperti SIMPEG dan e-Kinerja, penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) sebagai layanan administrasi kepegawaian internal di lingkungan pemerintah daerah, yang masih sangat jarang diteliti. Kedua, penelitian ini menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari sebagai fokus utama analisis, sehingga tidak hanya melihat pengguna aplikasi, tetapi juga peran Diskominfo sebagai pengelola infrastruktur, pengembang sistem, dan koordinator implementasi SPBE daerah. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan Design–Reality Gap Model dari Richard Heeks untuk memetakan kesenjangan antara desain sistem dan realitas implementasi berdasarkan tujuh dimensi analisis, yaitu informasi, teknologi, proses, tujuan dan nilai, sumber daya manusia, sistem manajemen, serta sumber daya pendukung. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan perspektif e-government, good governance, atau implementasi kebijakan secara umum. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi antara objek penelitian berupa aplikasi SiKePO, fokus implementasi SPBE pada layanan kepegawaian internal pemerintah daerah, serta penggunaan model Design–Reality Gap untuk menghasilkan pemetaan kesenjangan implementasi yang lebih komprehensif dan mendalam sebagai dasar penyusunan rekomendasi penguatan transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Batanghari

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari. Pendekatan kualitatif dinilai tepat untuk mengkaji fenomena yang kompleks karena tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga mencakup faktor sumber daya manusia, budaya organisasi, struktur birokrasi, serta proses kerja yang memengaruhi implementasi sistem. Creswell (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial dalam konteks alamiah, sedangkan Sugiyono (2022) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dianalisis secara induktif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selama periode Agustus 2025 sampai Juni 2026, yang meliputi tahapan penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling karena informan dipilih berdasarkan pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam implementasi SPBE

dan pengelolaan aplikasi SiKePO. Informan kunci penelitian adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari, karena memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan pengawasan implementasi SPBE. Informan lainnya meliputi Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi, staf teknis/operator pengelola SiKePO, serta pegawai pengguna aplikasi SiKePO. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis penelitian mengacu pada teori Design–Reality Gap yang dikemukakan oleh Heeks (2003) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain sistem SiKePO dengan realitas implementasinya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Implementasi SiKePO dalam Mendukung SPBE di Kabupaten Batanghari

Implementasi SPBE di Kabupaten Batanghari diwujudkan melalui berbagai aplikasi layanan digital, salah satunya Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. SiKePO merupakan bagian dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang berfungsi mengelola kehadiran ASN secara digital, real-time, dan terintegrasi. Oleh karena itu, SiKePO dipahami sebagai implementasi SPBE dalam manajemen kepegawaian daerah. Ketentuan ini didukung oleh Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 114 Tahun 2021, Nomor 158 Tahun 2022, dan Nomor 18 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan data kehadiran ASN melalui aplikasi SiKePO sebagai sistem administrasi kepegawaian berbasis digital.

1. Information

Pada dimensi information, SPBE menuntut data yang akurat, konsisten, relevan, dan selalu diperbarui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data kehadiran ASN dalam SiKePO direkam secara otomatis melalui sistem GPS dan verifikasi foto sehingga mampu meminimalkan manipulasi data dan meningkatkan keakuratan informasi. Namun, masih ditemukan kendala terkait kelengkapan data dan keterpaduan antar sistem sehingga integrasi data masih perlu dioptimalkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SiKePO meningkatkan disiplin pegawai karena absensi dipantau langsung dan tidak dapat dilakukan secara manipulatif. Informasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek akurasi dan transparansi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan. Meskipun demikian, kualitas informasi masih dipengaruhi oleh stabilitas jaringan sehingga potensi gangguan tetap ada.

2. Technology

Pada dimensi technology, SPBE mensyaratkan tersedianya jaringan internet yang stabil, server yang andal, serta sistem yang mudah diakses. Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 mengatur pembentukan tim pengelola SiKePO yang bertugas melakukan pengaturan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam implementasi SiKePO belum berjalan maksimal karena kendala jaringan internet dan belum meratanya pemeliharaan perangkat pendukung di setiap unit kerja. Informan menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan, tetapi sering terkendala jaringan terutama di wilayah dengan sinyal yang kurang baik. Kondisi ini menunjukkan adanya technology gap antara kebutuhan sistem digital dan kondisi infrastruktur di lapangan.

3. Processes

Pada dimensi processes, SPBE bertujuan mentransformasi proses kerja menjadi lebih efisien, sistematis, dan terstandarisasi. Implementasi SiKePO menunjukkan adanya sistem presensi yang lebih terstruktur, terjadwal, dan terdokumentasi secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan kehadiran ASN. Mekanisme kerja SiKePO telah diatur melalui Keputusan Bupati Nomor 114 Tahun 2021, Nomor 158 Tahun 2022, dan Nomor 18 Tahun 2025. Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat perbedaan pemahaman alur kerja antar perangkat daerah yang menyebabkan hambatan pada beberapa tahapan proses. Meskipun demikian, pengguna menilai proses absensi menjadi lebih jelas dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pada dimensi proses relatif kecil karena terdapat kesesuaian antara desain dan realitas implementasi.

4. Objectives & Values

Pada dimensi objectives & values, SPBE menekankan nilai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Implementasi SiKePO menunjukkan adanya perubahan pola kerja ASN menuju sistem yang lebih terbuka dan terukur. Tujuan penerapan SPBE sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 114 Tahun 2021, Nomor 158 Tahun 2022, dan Nomor 18 Tahun 2025 adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan disiplin ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah dipahami dan diterima oleh pengguna, terlihat dari meningkatnya kedisiplinan dan keterbukaan dalam pengelolaan kehadiran. Dengan demikian, kesenjangan pada dimensi objectives & values relatif kecil.

5. Staff & Skills

Pada dimensi staff & skills, SPBE menuntut kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan mengelola sistem digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ASN dalam menggunakan SiKePO masih bervariasi, baik dari segi penguasaan teknis maupun pemahaman fitur aplikasi. Walaupun struktur kelembagaan dan pembagian tugas telah diatur secara jelas dalam Keputusan Bupati Nomor 114 Tahun 2021, Nomor 158 Tahun 2022, dan Nomor 18 Tahun 2025, masih terdapat kesenjangan kompetensi teknis ASN. Informan menyatakan bahwa pegawai yang terbiasa menggunakan teknologi tidak mengalami kesulitan, sementara sebagian lainnya masih memerlukan bimbingan. Kondisi ini menunjukkan adanya people gap sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

6. Management System

Pada dimensi management system, SPBE memerlukan dukungan kebijakan, koordinasi antarunit kerja, dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Implementasi SiKePO menunjukkan bahwa data kehadiran telah dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja ASN. Tata kelola SPBE dan SiKePO telah diatur melalui Keputusan Bupati Nomor 114 Tahun 2021, Nomor 158 Tahun 2022, dan Nomor 18 Tahun 2025 yang mencakup koordinasi, pengendalian, evaluasi, pembagian wewenang, dan pelaporan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berkala dan evaluasi sistem belum berjalan secara konsisten sehingga fungsi manajemen belum sepenuhnya optimal dalam menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas sistem.

7. Environment

Pada dimensi environment, implementasi SPBE dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan infrastruktur jaringan, dukungan organisasi, dan kebijakan. Dalam implementasi SiKePO, keterbatasan jaringan di beberapa wilayah menunjukkan adanya environment gap yang memengaruhi efektivitas penggunaan sistem. Keputusan Bupati Nomor 114 Tahun 2021, Nomor 158 Tahun 2022, dan Nomor 18 Tahun 2025 mengatur bahwa SPBE dan SiKePO harus

didukung oleh sarana prasarana, anggaran, dan fasilitas yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Hari. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan internet, perangkat keras, serta alokasi anggaran pemeliharaan sistem belum memadai dan belum terdistribusi secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi di lapangan.

Implementasi SPBE melalui SiKePO di Kabupaten Batanghari telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendukung digitalisasi administrasi kepegawaian. SiKePO mampu meningkatkan disiplin ASN, efisiensi administrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, berdasarkan analisis teori Richard Heeks, masih terdapat kesenjangan pada dimensi teknologi, sumber daya manusia, dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas ASN, serta evaluasi berkelanjutan agar implementasi SPBE dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

3.2 Pemetaan Gap Implementasi SiKePO Berdasarkan 7 Dimensi Heeks

Analisis implementasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) sebagai bagian dari penerapan SPBE di Kabupaten Batanghari menggunakan pendekatan Design–Reality Gap Model Richard Heeks. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara kondisi ideal sistem (design) dengan kondisi aktual di lapangan (reality). Keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem beradaptasi dengan organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung. Analisis dilakukan berdasarkan tujuh dimensi utama Heeks, yaitu information, technology, processes, objectives and values, staffing and skills, management systems and structures, serta other resources. Semakin besar kesenjangan pada suatu dimensi, semakin rendah tingkat keberhasilan implementasi sistem, dan sebaliknya.

Tabel 1.

Pemetaan Gap Implementasi SiKePO

No	Dimensi Heeks	Kondisi Ideal (Design)	Kondisi Aktual (Reality)	Tingkat GAP	Dasar Penentuan GAP
1	Information (Informasi)	Data kehadiran akurat, real-time, dan terintegrasi	Data sudah digital, namun terkadang terjadi keterlambatan sinkronisasi	Kecil	Kesesuaian tinggi (sudah digital & hampir real-time), masalah jarang terjadi, dampak tidak signifikan
2	Technology (Teknologi)	Infrastruktur jaringan stabil dan sistem berjalan optimal	Masih terdapat kendala jaringan internet di beberapa wilayah	Sedang	Gangguan cukup sering pada area tertentu, cakupan masalah beberapa wilayah, berdampak pada akses sistem
3	Processes (Proses)	Proses absensi berjalan sistematis dan efisien	Proses sudah digital, namun terkadang terganggu saat sistem error	Kecil–Sedang	Proses utama berjalan, tetapi ada gangguan periodik (error), berdampak pada kelancaran sebagian proses
4	Objectives & Values (Tujuan & Nilai)	Meningkatkan disiplin dan transparansi ASN	Tujuan tercapai, namun belum maksimal di semua OPD	Kecil	Tujuan utama sudah tercapai, hanya belum merata, dampak terhadap tujuan masih relatif kecil
5	Staffing & Skills (SDM)	ASN memiliki kemampuan digital yang baik	Sebagian pegawai masih kurang memahami penggunaan aplikasi	Sedang	Kesenjangan kemampuan cukup terlihat, terjadi pada sebagian pengguna, memengaruhi efektivitas penggunaan sistem

6	Management Systems & Structures (Manajemen)	Koordinasi dan pengelolaan sistem berjalan optimal	Koordinasi sudah berjalan, namun belum merata di semua unit kerja	Kecil– Sedang	Sistem manajemen sudah ada, namun belum konsisten di semua unit, berdampak pada efektivitas koordinasi
7	Other Resources (Sumber Daya Lain)	Dukungan anggaran dan fasilitas memadai	Dukungan cukup, namun masih terbatas pada pengembangan sistem	Sedang	Sumber daya belum optimal, membatasi pengembangan sistem, berdampak pada peningkatan layanan

Sumber: Richard Heeks (2003).

Penentuan tingkat kesenjangan didasarkan pada tingkat kesesuaian antara design dan reality, dengan mempertimbangkan frekuensi permasalahan, dampak terhadap kinerja sistem, dan cakupan permasalahan. Gap dikategorikan kecil apabila tidak mengganggu kinerja utama, sedang apabila memengaruhi sebagian proses, dan kecil–sedang apabila berada di antara keduanya.

1. Information (Informasi)

Tingkat kesenjangan tergolong kecil karena sistem telah mampu menghasilkan data kehadiran yang relatif akurat dan terintegrasi. Namun, masih terdapat keterlambatan sinkronisasi data yang berpotensi memengaruhi ketepatan informasi dalam pengambilan keputusan.

2. Technology (Teknologi)

Kesenjangan pada dimensi teknologi tergolong sedang. Kendala utama berasal dari keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, sehingga sistem presensi berbasis real-time belum dapat berfungsi secara maksimal.

3. Processes (Proses)

Pada dimensi proses, sistem absensi telah berjalan secara digital dan lebih efisien. Namun, masih terdapat gangguan teknis seperti error system yang memengaruhi kelancaran proses absensi sehingga tingkat kesenjangan berada pada kategori kecil–sedang.

4. Objectives & Values (Tujuan dan Nilai)

Implementasi SiKePO telah mendukung peningkatan disiplin dan transparansi ASN. Walaupun demikian, pencapaian tujuan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh OPD sehingga tingkat kesenjangan tergolong kecil.

5. Staffing & Skills (SDM)

Kesenjangan pada dimensi SDM tergolong sedang karena masih terdapat perbedaan kemampuan digital ASN dalam menggunakan aplikasi. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pemanfaatan sistem dan menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi pengguna.

6. Management Systems & Structures (Manajemen)

Koordinasi dan pengelolaan sistem telah berjalan, namun belum optimal di seluruh unit kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola sistem masih perlu diperkuat agar lebih terstruktur, konsisten, dan terkoordinasi, sehingga kesenjangan berada pada kategori kecil–sedang.

7. Other Resources (Sumber Daya Lain)

Kesenjangan pada dimensi sumber daya tergolong sedang karena dukungan anggaran dan fasilitas masih terbatas, khususnya untuk pengembangan sistem. Kondisi ini dapat memengaruhi keberlanjutan inovasi dan peningkatan layanan SiKePO.

Implementasi SiKePO di Kabupaten Batanghari berada pada kategori cukup baik dengan tingkat kesenjangan yang bervariasi pada setiap dimensi. Kesenjangan paling dominan terdapat pada dimensi technology, staffing and skills, dan other resources. Meskipun SiKePO telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin ASN dan efisiensi administrasi kepegawaian, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan sumber daya yang berkelanjutan masih diperlukan untuk memperkecil kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual dalam implementasi SPBE.

3.3 Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi SiKePO

Analisis faktor penghambat dan pendukung implementasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan kerangka kebijakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi sistem serta aspek yang perlu ditingkatkan dalam mendukung digitalisasi pemerintahan.

A. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan elemen yang memperkuat implementasi SiKePO dalam mendukung SPBE di Kabupaten Batanghari.

1. Dukungan Kebijakan Pemerintah (Regulasi SPBE)

Implementasi SiKePO didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang menjadi landasan hukum dan arah kebijakan digitalisasi layanan pemerintahan. Kebijakan ini memberikan legitimasi hukum, mendorong standarisasi sistem, integrasi data, serta memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan modern.

2. Komitmen Pimpinan Daerah

Komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD mendukung keberhasilan implementasi SiKePO melalui kebijakan yang mewajibkan seluruh ASN menggunakan sistem presensi elektronik. Dukungan ini memperkuat kepatuhan ASN dan menunjukkan bahwa keberhasilan sistem dipengaruhi oleh kepemimpinan serta komitmen organisasi terhadap transformasi digital.

3. Kemudahan Akses dan Penggunaan Aplikasi

SiKePO memiliki tampilan yang sederhana dan user-friendly sehingga mudah digunakan oleh ASN dengan berbagai tingkat kemampuan teknologi. Selain itu, aplikasi berbasis mobile memungkinkan presensi dilakukan secara cepat dan praktis, sehingga mendukung efisiensi administrasi kepegawaian.

4. Peningkatan Disiplin ASN

SiKePO meningkatkan disiplin ASN karena kehadiran tercatat secara otomatis, real-time, dan berbasis lokasi. Sistem ini mengurangi potensi titip absen serta menciptakan pengawasan yang lebih objektif, terukur, dan transparan.

5. Monitoring dan Evaluasi yang Lebih Transparan

Data kehadiran tersimpan secara digital sehingga dapat dipantau secara real-time oleh pihak yang berwenang. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas, mempermudah evaluasi kinerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dalam pengelolaan kepegawaian.

B. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi SiKePO, baik dari aspek teknis, SDM, maupun infrastruktur pendukung.

1. Keterbatasan Jaringan Internet

Kendala utama implementasi SiKePO adalah kualitas jaringan internet yang belum stabil di beberapa wilayah. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan sinkronisasi data dan menghambat proses presensi secara real-time.

2. Kemampuan SDM yang Belum Merata

Sebagian ASN masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan aplikasi berbasis digital. Perbedaan kemampuan dan literasi digital ini memengaruhi efektivitas penggunaan sistem serta proses adaptasi terhadap teknologi.

3. Gangguan Teknis Sistem

Gangguan teknis seperti error system dan lambatnya proses sinkronisasi data masih terjadi pada waktu tertentu, terutama saat penggunaan tinggi atau jaringan tidak stabil. Kondisi ini dapat menghambat proses presensi dan menurunkan kenyamanan pengguna.

4. Keterbatasan Fasilitas Pendukung

Sebagian pegawai masih menggunakan perangkat dengan spesifikasi yang kurang memadai sehingga memengaruhi kecepatan akses dan stabilitas aplikasi. Perbedaan kualitas perangkat juga menimbulkan variasi pengalaman penggunaan sistem.

5. Adaptasi Perubahan Sistem

Peralihan dari sistem manual ke sistem digital membutuhkan waktu adaptasi. Pada tahap awal masih ditemukan resistensi dan keterlambatan penyesuaian dari sebagian pegawai, meskipun tingkat penerimaan terhadap SiKePO terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Implementasi SiKePO telah sejalan dengan prinsip SPBE dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Faktor pendukung utama meliputi dukungan kebijakan, komitmen pimpinan, kemudahan penggunaan aplikasi, peningkatan disiplin ASN, serta monitoring yang lebih transparan. Sementara itu, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan jaringan internet, kemampuan SDM yang belum merata, gangguan teknis sistem, keterbatasan fasilitas pendukung, dan proses adaptasi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas SDM, dan mengoptimalkan dukungan sistem agar implementasi SiKePO dapat berjalan lebih efektif.

3.4 Model Implementasi SiKePO dalam Mendukung SPBE

Model implementasi SiKePO dalam mendukung SPBE di Kabupaten Batanghari merupakan hasil sintesis temuan penelitian berdasarkan wawancara, observasi, analisis 7 Dimensi Heeks, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem. Model ini menggambarkan hubungan antara kebijakan, teknologi, sumber daya manusia, proses pelaksanaan, hingga dampak yang dihasilkan dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

A. Komponen Model Implementasi SiKePO

1. Input (Masukan)

Komponen input meliputi kebijakan SPBE, dukungan pimpinan daerah, infrastruktur teknologi (server dan jaringan internet), serta sumber daya manusia (ASN dan operator). Keempat komponen tersebut menjadi dasar yang menentukan kesiapan dan keberhasilan implementasi SiKePO.

2. Process (Proses)

Proses implementasi dimulai dari penggunaan aplikasi berbasis GPS dan verifikasi foto, penginputan data kehadiran secara real-time, monitoring oleh admin atau OPD terkait, hingga evaluasi data kehadiran secara berkala. Proses ini menciptakan sistem kerja yang terstruktur, terintegrasi, dan berbasis digital.

3. Output (Keluaran)

Output yang dihasilkan berupa data kehadiran ASN yang lebih akurat dan terdokumentasi secara digital, peningkatan disiplin pegawai, serta tersedianya data yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja ASN.

4. Outcome (Dampak)

Outcome implementasi SiKePO meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi administrasi kepegawaian, terwujudnya transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan implementasi SPBE di Kabupaten Batanghari.

B. Model Konseptual Implementasi SiKePO

Model implementasi SiKePO menggunakan pendekatan IPOO (Input → Process → Output → Outcome).

- Input: kebijakan SPBE, dukungan pimpinan, infrastruktur teknologi, dan SDM.
- Process: penggunaan aplikasi, pencatatan data real-time, monitoring, dan evaluasi.
- Output: data kehadiran yang akurat, peningkatan disiplin ASN, dan data evaluasi kinerja.
- Outcome: efisiensi administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan SPBE.

Model ini dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kebijakan pemerintah, komitmen pimpinan, dan kemudahan sistem, serta faktor penghambat seperti keterbatasan jaringan internet, kemampuan SDM yang beragam, dan kendala teknis sistem.

C. Integrasi Model dengan SPBE

Implementasi SiKePO mendukung prinsip-prinsip SPBE melalui:

- Efisiensi, karena proses absensi menjadi lebih cepat dan praktis.
- Transparansi, karena data kehadiran dapat dipantau secara terbuka dan meminimalkan manipulasi.
- Akuntabilitas, karena data terdokumentasi secara digital dan menjadi dasar evaluasi kinerja ASN.
- Integrasi sistem, karena mendukung digitalisasi administrasi kepegawaian dan keterpaduan data antar unit kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, model implementasi SiKePO dapat dikategorikan sebagai model berbasis teknologi dengan pendekatan top-down dan adaptif. Pendekatan top-down terlihat dari dukungan kebijakan SPBE dan komitmen pimpinan daerah, sedangkan pendekatan adaptif terlihat dari penyesuaian terhadap kondisi lapangan seperti keterbatasan jaringan, kemampuan digital ASN, dan infrastruktur yang tersedia. Keberhasilan implementasi SiKePO tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi, kualitas SDM, dan dukungan infrastruktur dalam mendukung SPBE di Kabupaten Batanghari.

3.5 Rekomendasi Strategis dalam Optimalisasi Implementasi SiKePO

Rekomendasi strategis disusun berdasarkan hasil analisis gap menggunakan 7 Dimensi Heeks serta identifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi SiKePO di Kabupaten Batanghari. Rekomendasi difokuskan pada dimensi yang memiliki gap sedang, yaitu teknologi, sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung lainnya.

A. Rekomendasi Berdasarkan Dimensi Heeks

Tabel 2.

Dimensi Heeks

No	Dimensi	Permasalahan Utama	Rekomendasi Strategis
1	<i>Technology</i>	Jaringan internet tidak stabil	Penguatan infrastruktur jaringan, penyediaan Wi-Fi kantor, dan optimalisasi server
2	<i>Staffing & Skills</i>	Kemampuan digital ASN belum merata	Pelatihan (bimtek) berkala dan pendampingan penggunaan aplikasi
3	<i>Processes</i>	Gangguan teknis sistem	Pemeliharaan sistem (maintenance) dan peningkatan kualitas aplikasi
4	<i>Management</i>	Koordinasi belum optimal	Penguatan koordinasi antar OPD dan monitoring berkala
5	<i>Other Resources</i>	Keterbatasan fasilitas	Penyediaan perangkat pendukung (smartphone/komputer)

Sumber:peneliti

Permasalahan utama implementasi SiKePO meliputi ketidakstabilan jaringan internet, kemampuan digital ASN yang belum merata, gangguan teknis sistem, koordinasi antar OPD yang

belum optimal, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem, koordinasi yang lebih baik, dan penyediaan fasilitas pendukung.

B. Strategi Optimalisasi Implementasi SiKePO

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi
Meningkatkan kualitas jaringan internet, menyediakan Wi-Fi kantor, dan mengoptimalkan server agar proses presensi berbasis real-time berjalan lebih efektif dan stabil.
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) secara berkala untuk meningkatkan literasi digital ASN dan kemampuan penggunaan aplikasi SiKePO.
3. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Melakukan pembaruan (update) dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk mengurangi error, meningkatkan keamanan data, dan menjaga kualitas layanan.
4. Penguatan Kebijakan dan Pengawasan
Memperkuat kebijakan penggunaan SiKePO serta meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan kepatuhan ASN.
5. Integrasi Sistem dengan SPBE
Mengintegrasikan SiKePO dengan sistem kepegawaian dan penilaian kinerja ASN agar mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatkan efisiensi administrasi.

C. Prioritas Rekomendasi

Tabel 3.

Prioritas Rekomendasi

Prioritas	Strategi	Alasan
Tinggi	Penguatan jaringan internet	Kendala utama dalam implementasi
Tinggi	Pelatihan SDM	Berpengaruh langsung terhadap penggunaan sistem
Sedang	Pengembangan sistem	Mengurangi error dan meningkatkan kualitas layanan
Sedang	Penguatan koordinasi	Mendukung kelancaran implementasi
Rendah	Penyediaan fasilitas tambahan	Bersifat pendukung

Sumber:peneliti

Prioritas utama diarahkan pada penguatan jaringan internet dan pelatihan SDM karena memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas penggunaan sistem. Strategi lainnya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

D. Keterkaitan dengan SPBE

Rekomendasi strategis ini sejalan dengan tujuan SPBE dalam:

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik.
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran SiKePO sebagai instrumen pendukung transformasi digital pemerintahan dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas di Kabupaten Batanghari.

3.6 Tingkat Keberhasilan Implementasi SPBE Melalui SiKePO di Kabupaten Batanghari

Tingkat keberhasilan implementasi SPBE melalui SiKePO dianalisis berdasarkan pemetaan gap menggunakan model Heeks, faktor pendukung dan penghambat, serta model implementasi yang telah disusun. Secara umum, implementasi SiKePO telah berjalan cukup baik dan mendukung prinsip SPBE, khususnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

A. Penilaian Tingkat Keberhasilan Berdasarkan Dimensi Heeks

Tabel 4.

Analisis 7 Dimensi Heeks

No	Dimensi	Tingkat Gap	Kategori Keberhasilan
1	<i>Information</i>	Kecil	Tinggi
2	<i>Technology</i>	Sedang	Cukup
3	<i>Processes</i>	Kecil–Sedang	Cukup
4	<i>Objectives & Values</i>	Kecil	Tinggi
5	<i>Staffing & Skills</i>	Sedang	Cukup
6	<i>Management Systems</i>	Kecil–Sedang	Cukup
7	<i>Other Resources</i>	Sedang	Cukup

Sumber:peneliti

Dimensi information dan objectives & values menunjukkan tingkat keberhasilan tinggi karena memiliki gap kecil. Sementara itu, dimensi technology, processes, staffing & skills, management systems, dan other resources berada pada kategori cukup karena masih terdapat beberapa kendala teknis, SDM, dan infrastruktur.

B. Kontribusi SiKePO terhadap SPBE

Implementasi SiKePO memberikan kontribusi terhadap SPBE melalui:

- Efisiensi → Mengurangi proses manual dalam absensi.
- Transparansi → Data kehadiran dapat dipantau secara terbuka.
- Akuntabilitas → Data menjadi dasar evaluasi kinerja ASN.
- Digitalisasi Layanan Internal → Mendukung transformasi birokrasi berbasis teknologi.

SiKePO telah menjadi bagian dari ekosistem SPBE dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern.

Implementasi SiKePO dalam mendukung SPBE di Kabupaten Batanghari telah berjalan cukup baik, ditunjukkan oleh peningkatan disiplin ASN serta tersedianya data kehadiran yang akurat dan transparan. Namun, masih terdapat kendala pada aspek infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, dan dukungan sistem. Oleh karena itu, diperlukan implementasi rekomendasi strategis secara berkelanjutan agar tingkat keberhasilan SPBE dapat terus meningkat dan mencapai hasil yang lebih optimal.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Batanghari telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan disiplin pegawai, efisiensi administrasi kepegawaian, transparansi, dan akuntabilitas kinerja ASN. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi berada pada kategori cukup hingga tinggi, terutama pada dimensi informasi serta tujuan dan nilai (objectives and values), yang ditandai dengan tersedianya data kehadiran yang lebih akurat dan mendukung pengawasan kinerja pegawai secara lebih objektif. Sama halnya dengan temuan penelitian Dewia Zebua dkk. yang menyatakan bahwa penerapan aplikasi kepegawaian berbasis elektronik mampu meningkatkan disiplin ASN, serta penelitian Wuryan Andayani yang menemukan bahwa digitalisasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan. Temuan ini juga memperkuat penelitian R.M. Iman Rifai dan Suci Flambonita yang menyebutkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi SiKePO belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek infrastruktur jaringan, kapasitas sumber

daya manusia, dan dukungan sistem yang menyebabkan munculnya kesenjangan pada dimensi technology, staffing and skills, serta other resources. Temuan ini sejalan dengan penelitian Bagas Dwi Kencono yang menyatakan bahwa tantangan utama implementasi SPBE terletak pada keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan budaya kerja birokrasi, serta penelitian M.I.R. Rantung yang menunjukkan bahwa implementasi SPBE di daerah telah berjalan tetapi belum optimal. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih banyak mengkaji SPBE pada level makro, penelitian ini secara khusus mengungkap kondisi implementasi SPBE pada layanan kepegawaian internal melalui aplikasi SiKePO serta menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan integrasi sistem. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keberhasilan SPBE tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan desain sistem dengan kondisi nyata di lapangan.

3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SiKePO tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan kehadiran, tetapi juga secara tidak langsung membentuk budaya kerja yang lebih disiplin dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari. Kehadiran fitur GPS dan verifikasi foto membuat pegawai lebih tertib dalam melakukan presensi serta mengurangi potensi manipulasi data kehadiran. Di sisi lain, keberhasilan implementasi SiKePO didukung oleh komitmen pimpinan daerah, regulasi SPBE yang kuat, serta kemudahan penggunaan aplikasi. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan jaringan internet, perbedaan kemampuan literasi digital ASN, gangguan teknis sistem, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan organisasi, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi Sistem Informasi Kehadiran Pegawai Online (SiKePO) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari telah berjalan cukup efektif dan mampu mendukung optimalisasi layanan kepegawaian melalui peningkatan akurasi data kehadiran, efisiensi proses administrasi, transparansi, serta akuntabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan Design–Reality Gap Richard Heeks, tingkat kesesuaian implementasi tergolong tinggi pada aspek informasi, proses, tujuan dan nilai, serta sistem manajemen, namun masih terdapat kesenjangan pada aspek teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan sumber daya pendukung. Dengan demikian, implementasi SiKePO sebagai bagian dari SPBE dapat dikategorikan cukup berhasil dalam mendukung transformasi digital pemerintahan di Kabupaten Batanghari, meskipun belum sepenuhnya optimal

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu instansi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh perangkat daerah. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang berfokus pada implementasi aplikasi SiKePO berdasarkan persepsi informan dan kondisi saat penelitian berlangsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada lebih banyak OPD atau pemerintah daerah lain untuk membandingkan implementasi SPBE melalui aplikasi kepegawaian digital. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji integrasi SiKePO dengan sistem kepegawaian lainnya serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap kinerja ASN dan keberhasilan SPBE secara lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batanghari beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, kesempatan, serta dukungan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan, pegawai, dan pihak-pihak yang telah membantu serta berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad KM, M., & Zubakhrum, M. B. (2024). Administrasi pemerintahan daerah. Askara Sastra Media. <https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=21059>
- Andayani, W., Dahlia, Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., & Yanuarisa, Y. (2024). Penguatan good governance: Pengalaman penerapan electronic government pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 116–131. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.240>
- Dowa, P. P. C. (2022). Implementasi penggunaan aplikasi e-NADI yang terintegrasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah (JAPD)*. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/2742>
- Hendiyani, M. F., & Fansuri, H. (2024). Evaluasi kebijakan clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Studi pada kementerian dan lembaga. *Jurnal Media Birokrasi*, 6(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/4940>
- Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP/article/view/2680>
- Kencono, B. D., Putri, H. H., & Handoko, T. W. (2024). Transformasi pemerintahan digital: Tantangan dalam perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia. *JIIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1498–1506. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X01000661>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi kebijakan publik (Konsep dan model). Tahta Media Group. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/733>
- Rusdy, R. M. I., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>

- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
<https://id.scribd.com/document/691644831/Metode-Penelitian-2022-SUGIYONO>
- Taufan, T & Hidayat (2023) Analisis Aplikasi “ASN Memayu” Di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD).
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/3809>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/009539977500600404>
- Zebua, D., & Waruwu, E. (2025). Evaluasi efektivitas kehadiran pegawai melalui penerapan aplikasi e-kinerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias. Tuhenori Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1).
<https://falulufohalowo.com/index.php/tuhenori/article/view/121>

